

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Republik dipimpin oleh seorang Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi garis khatulistiwa dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa (BPS 2016). Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua dan terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Semboyan nasional Indonesia adalah "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Berbeda-beda namun tetap satu), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia juga memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati dunia.

Penelitian ini difokuskan pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Keanekaragaman baik dari keadaan alam hingga keadaan budaya membuat daerah di setiap provinsi di Indonesia memiliki keunikan masing-masing yang menyebabkan perbedaan dalam menjalankan pemerintahan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan *e-Government* dimulai dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan diharapkan membawa dampak positif dalam meningkatkan perekonomian negara berkembang menuju negara maju. Salah satu pertimbangan instruksi presiden ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*. Instruksi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Salah satu usaha meningkatkan perekonomian negara adalah dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dikenal dengan *Good Governance*. Model penyampaian *e-Government* yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Hardjaloka (2014) menemukan dengan diterapkannya *e-Government* dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan mengurangi biaya. Hal ini karena penggunaan aplikasi berbasis internet dapat menjalankan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data dan komunikasi dengan cepat. Selain itu, penerapan *e-Government* dapat meningkatkan pelayanan karena adanya integrasi yang memungkinkan pengguna layanan dapat menggunakan satu *website* untuk seluruh jenis layanan yang dibutuhkan. *E-Government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui saran dan masukan, dan terakhir dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi.

Dalam pelaksanaannya, *e-Government* di Indonesia masih mengalami perkembangan. Pemerintah sendiri masih merancang pedoman yang baku untuk penerapan yang merata di seluruh pemerintahan Indonesia. Implementasi yang belum merata dapat disebabkan oleh adanya hambatan yang berbeda di setiap

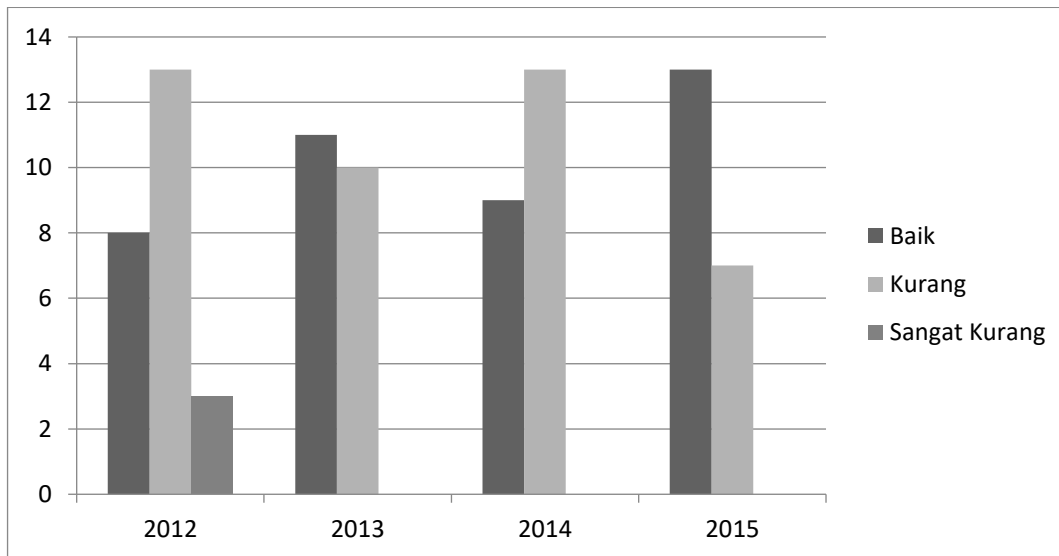
daerah. Menurut Sosiawan (2008), ada banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan *e-Government* di negara berkembang. Ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan *e-Government* tersebut yaitu pertama, inisiatif dan pemaknaan implementasi *e-Government* oleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Kedua, implementasi melalui situs *web* daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah mengidentikkan implementasi *e-Government* hanya sekadar membuat situs *web* pemerintahan daerah saja (*web presence*), sehingga penyelenggaraan *e-Government* hanya berhenti ditahap pematangan saja (tahap kedua) dari 4 tahap yang harus dilalui dan belum mencapai tahap pematapan dan pemanfaatan.

Dalam menjalankan pemerintahan, saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mulai melaksanakan *e-Government*. *E-Government* merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. *E-Government* diterapkan pemerintah mulai dari tingkat kementerian, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan kelurahan. Untuk mengukur implementasi *e-Government*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) mengadakan pemeringkatan *e-Government* berdasarkan 5 kriteria. Lima kriteria tersebut yakni kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Adanya indeks pemeringkatan ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah, sebagai dorongan peningkatan TIK di lingkungan pemerintah dan melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Implementasi *e-Government* jika dilihat dari Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tingkat provinsi tahun 2012 hingga tahun 2015, masih banyak provinsi yang memperoleh kriteria kurang. Berikut grafik Pemeringkatan *e-Government* tingkat provinsi tahun 2012-2015 :

Grafik 1

Pemeringkatan *E-Government* Tingkat Provinsi Tahun 2012-2015



Sumber: Pemeringkatan e-Government Indonesia KEMKOMINFO (data diolah)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa masih banyak provinsi yang memperoleh kriteria kurang bahkan sangat kurang. Pada tahun 2012, terdapat 15 provinsi dengan kriteria kurang dan 3 provinsi pada kriteria sangat kurang. Di tahun 2013 nilai PeGI mulai meningkat dilihat dari jumlah provinsi dengan kriteria kurang menjadi 10 provinsi. Secara umum PeGI mengalami penurunan nilai rata-rata pada tahun 2014, namun kembali meningkat pada tahun 2015. Hal ini dapat dikaitkan dengan diadakannya pemilihan umum pada tahun 2014 yang mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat setelah pergantian struktur pemerintah daerah. Walaupun nilai rata-rata PeGI kembali meningkat di tahun 2015, masih ada 7 provinsi yang berada pada kriteria kurang. Hal ini menunjukkan perkembangan implementasi *e-Government* belum merata membaik pada tingkat provinsi.

Salah satu bentuk implementasi *e-Government* yaitu pengungkapan melalui *website* pemerintahan daerah, tidak hanya terbatas pada pengungkapan informasi keuangan saja tetapi termasuk pengungkapan informasi non keuangan. Penelitian mengenai *e-Government* ini telah banyak dilakukan baik di dalam maupun luar negeri. Contohnya mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi *e-Government*. Al-wazir dan Zheng (2014) meneliti faktor yang mempengaruhi

implementasi *e-Government* pada negara Yaman. Al-Naimat *et al.*, (2013) menemukan tiga faktor utama yang menentukan kesuksesan implementasi *e-Government* di Yordania, yaitu faktor organisasi, faktor teknologi dan faktor sumber daya manusia. Di Indonesia, Sipatuhar dan Sutaryo (2016) meneliti faktor penentu implementasi *e-Government*. Sebelumnya, Dewi dan Haryanto (2013) juga telah meneliti faktor yang mempengaruhi kemungkinan implementasi *e-Government*.

Menurut penelitian terdahulu terdapat banyak variabel independen yang mempengaruhi implementasi *e-Government*. Namun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit. Pemilihan variabel independen ini dikarenakan adanya inkonsistensi antara hasil penelitian sebelumnya.

Kompetisi politik secara umum dapat dipahami sebagai tingkat daya saing untuk menduduki suatu jabatan strategis pada pemerintahan. Lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah bersama DPRD mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 42, DPRD berwenang membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui RAPBD Bersama kepala daerah serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sehingga banyaknya anggota DPRD terpilih yang bertugas akan mempengaruhi pengawasan terhadap pemerintahan. Pengawasan tersebut meliputi operasional pemerintahan, termasuk pelaksanaan *e-Government*. Sejalan dengan teori agensi dimana masyarakat sebagai prinsipal dan para anggota dewan sebagai agen, para politikus mengharapkan mendapatkan suara pemilih dari masyarakat lebih banyak, sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemilih (Dewi dan Haryanto, 2013).

Penelitian Andriani (2015) menemukan bahwa kompetisi politik berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam *website* pemerintahan daerah. Sebelumnya Dewi dan Haryanto (2013) memperoleh

hasil penelitian yang menunjukkan jumlah anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Namun, dalam penelitian Rahim dan Martani (2015) tidak ditemukan adanya pengaruh kompetisi politik terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintahan daerah. Garcia-Sanchez, *et al* (2013) juga mengungkapkan adanya hubungan negatif signifikan antara kompetisi politik dengan pengungkapan informasi non-keuangan pada pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan, sehingga besarnya pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi pemenuhan sarana prasarana dalam rangka pembangunann daerah. *E-Government* dalam penerapannya membutuhkan biaya yang besar. Hal ini memungkinkan jika kesejahteraan ekonomi daerah sudah baik, pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup untuk melayani masyarakat melalui implementasi *e-Government* (Sipatuhar dan Sutaryo, 2016). Dewi dan Haryanto (2013) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-Government*. Diikuti oleh Sipatuhar dan Sutaryo (2016) yang juga mengungkapkan pengaruh positif PAD terhadap implementasi *e-Government*. Namun Yosihana dan Yaya (2016) tidak menemukan pengaruh signifikan PAD terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dimana IFR merupakan salah satu implementasi *e-Government*.

Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern (Faud, 2015:12). Daerah yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) berarti telah menjalankan pemerintah dengan baik serta telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat dipengaruhi dengan adanya implementasi *e-Government*, salah satunya dengan pengungkapan melalui *website* daerah. Hal ini dikarenakan informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dinikmati masyarakat secara terbuka. Berdasarkan hasil penelitian Rahim dan Martani (2015), opini audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintahan daerah secara signifikan. Berbeda dengan penelitian Utomo dan Aryani (2016) yang menemukan tidak adanya pengaruh signifikan yang dihasilkan dari opini audit sebagai faktor penentu pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tidak meratanya implementasi *e-Government* pada Pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia serta adanya inkonsistensi yang dihasilkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi *e-Government* khususnya pada Pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit terhadap Implementasi E-Government (Studi pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2012-2015)”**.

1.3 Perumusan Masalah

E-Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi *e-Government* hingga saat ini masih dalam tahap perkembangan di Indonesia baik dari sisi peraturan maupun pelaksanaannya. Semakin baik implementasi *e-Government* suatu daerah, maka semakin baik pula perekonomiannya. Hal ini dikarenakan dengan maksimalnya implementasi *e-Government* membuktikan akuntabilitas dan transparansi yang baik.

Belum adanya regulasi yang merinci mengenai *e-Government* mengakibatkan tidak meratanya implementasi pada Pemerintah daerah seperti yang tergambar pada grafik Pemeringkatan *e-Government* tingkat Provinsi tahun 2012-2015, Implementasi *e-Government* tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

diantaranya tingkat kompetisi politik suatu daerah yang diukur dari jumlah anggota DPRD terpilih. Faktor lainnya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintahan daerah serta pengungkapan informasi dan tingkat kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ditunjukkan melalui opini audit.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi :

1. Bagaimana kompetisi politik, pendapatan asli daerah, opini audit dan implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia?
2. Apakah kompetisi politik, pendapatan asli daerah dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Kompetisi politik terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia?
 - b. Pendapatan asli daerah terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia?
 - c. Opini audit terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetisi politik, pendapatan asli daerah, opini audit dan implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2012-2015.

2. Untuk mengetahui apakah kompetisi politik, pendapatan asli daerah dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2012-2015.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Kompetisi politik terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2012-2015.
 - b. Pendapatan asli daerah terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2012-2015.
 - c. Opini audit terhadap implementasi *e-Government* pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2012-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat ini dikelompokkan kedalam dua aspek, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang berkaitan dengan mengetahui kompetisi politik, pendapatan asli daerah, opini audit dan implementasi *e-Government*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis berhubungan dengan praktik didalam penerapan suatu teori. Oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar hasil penelitian dapat memberikan informasi tambahan mengenai pentingnya pengaruh kompetisi politik, pendapatan asli daerah, opini audit dalam implementasi *e-Government* bagi pemerintah daerah tingkat provinsi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel independen dan tiga variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah implementasi *e-Government*. Variabel independen yang mungkin mempengaruhi implementasi *e-Government* adalah kompetisi politik, pendapatan asli daerah dan opini audit. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan akan mempengaruhi implementasi *e-Government*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah provinsi di Indonesia dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2015. Data dalam penelitian diperoleh dari *website* resmi BPS (bps.go.id), indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia dari *website* Kominfo (pegilayanan.go.id), opini audit dari *website* BPK Provinsi dan data jumlah anggota dewan dari *website* resmi KPU dan *website* DPRD Provinsi.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan September 2016 sampai bulan Maret 2017. Periode pada penelitian ini menggunakan data tahun 2012 sampai tahun 2015.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-bab. Sistematika penulisan dimulai dari bab dua dalam penelitian ini secara garis besar, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian tentang teori pendukung untuk variable yang akan diteliti, bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai pendukung dan acuan penelitian, kerangka pemikiran membahas pola pikir untuk menggambarkan permasalahan yang akan dibahas, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, serta lingkup penelitian yang menjelaskan batasan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi dan definisi variabel operasional, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari pengelolaan data yang diperoleh. Sehingga hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis agar menemukan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penafsiran terhadap analisa temuan penelitian dan saran secara kongkrit. Adapun saran yang diberikan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan yang peneliti selanjutnya.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan